# BAB 2

# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Literatur Review

Agar lebih mengenal, mengetahui, dan memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini, peneliti melakukan reviu literatur atau peninjauan kembali atas pustaka-pustaka atau tulisan terdahulu yang terkait.

Karya pertama yang ditinjau kembali ialah *working paper* yang dikeluarkan oleh *Istituto Affari Internazionali* dengan judul *Russia’s View of Ukraine After Crisis* dan ditulis oleh Giovanna De Maio. Dalam literatur tersebut, Maio mencoba menjelaskan tentang semakin memburuknya hubungan antara Moskow dan Kiev serta sanksi yang dapat menimpa Rusia oleh masyarakat internasional. Dalam menjawab pertanyaan tentang masalah yang dibahas, Maio menganalisis dari sudut pandang para pemangku kepentingan rakyat Rusia, mulai dari elit politik dan ekonomi, *civil society*, media massa, akademisi, masyarakat umum, dan gereja Orthodoks. Diakhir tulisan, Maio berkesimpulan bahwa ide bahwa Ukraina adalah bagian yang tak terpisahkan dari Rusia adalah persepsi sebagian besar pemangku kepentingan rakyat Rusia.

Selain itu memburuknya hubungan Ukraina-Rusia membuat sebagian besar rakyat Rusia menggap bahwa Ukraina adalah musuh mereka: dipimpin oleh fasis dan “boneka “ barat. Terakhir, Maio berkesimpulan bahwa krisis ini telah menunjukkan sejauh mana persepsi masyarakat Rusia mampu mempengaruhi keputusan pemerintah sampai menimbulkan kecaman berat dari dunia internasional. Selain alasan keamanan dan strategis, Rusia melihat Ukraina masih berada di ruang lingkup pengaruhnya dengan demikian masyarakat Rusia mendorong Moskow untuk berperang. Selain itu bahasan seputar Ukraina sangat efektif dalam memberikan contoh bagi siapa saja yang menyimpang dari jalan yang Moskow pilih (Maio, 2016).

Jika dibandingkan, terdapat kesamaan antara tulisan ini dengan tulisan karya Maio yaitu menganalisis orientasi serta kepentingan yang terdapat dlam kebijakan luar negeri Rusia terhadap krisis krisis yang terjadi di Ukraina. Namun, terdapat perbedaan antara tulisan ini dengan tulisan Maio, yaitu peneliti lebih menitikberatkan kepada kebijakan luar negeri Rusia di Ukraina sebagai jalan untuk menguatkan *sphere of influence* serta pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan di Ukraina. Meskipun begitu, peneliti akan tetap menggunakan tulisan Maio sebagai tinjauan dalam melaksanakan penelitian ini, khususnya berkaitan dengan kepentingan Rusia dalam krisis Ukraina.

Karya kedua ialah, laporan yang dikeluarkan oleh *Valdai Discussion Club* dengan judul *The Crisis In Ukraine: Root, Causes, and Scenarios for The Future*. Dalam laporan yang diterbitkan di Moskow tersebut menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya krisis di Ukraina. Secara khusus, laporan tersebut membahas penyebab krisis dari sudut pandang sejarah, ekonomi, dan politik, serta peran faktor dan aktor eksternal khususnya Rusia dan dunia barat yang pada akhirnya membuat situasi Ukraina menjadi tidak stabil. Peran eksternal dibahas dengan menganalisis kepentingan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka dalam krisis tersebut. Laporan tersebut menyajikan skenario-skenario yang dapat muncul dalam krisis yang terjadi di Ukraina serta memberika skenario terbaik yang dirasa pantas dalam penyelesaian krisis tersebut (Valdai Discussion Club, 2014).

Jika dibandingkan dengan laporan dari Valdai, penelitian ini memiliki kesamaan yaitu menganalisis penyebab terjadinya krisis yang terjadi di Ukraina dari sudut pandang sejarah, politik, dan ekonomi. Kesamaan lainnya ialah secara khusus menganalis peran faktor dan aktor eksternal beserta kepentingan dibaliknya, khususnya peran Rusia dalam krisis tersebut. Namun, berbeda dengan laporan Valdai, penelitian membatasi untuk tidak memberikan skenario-skenario yang dapat muncul. Serta penelitian ini secara khusus menekankan kepada kebijakan luar negeri Rusia dalam krisis di Ukraina serta pengaruhnya pada stabilitas keamanan Ukraina. Tetapi, peneliti tetap menggunakan laporan Valdai sebagai tinjauan dalam melakukan penelitian ini karena laporan tersebut secara khusus membahas sebab-sebab permasalahan yang membuat krisis di Ukraina terjadi.

Tulisan terakhir yang menjadi bahan tinjauan dari penelitian ini adalah jurnal berjudul *The Origin of Peace, Non-Violence, and Conflict in Ukraine* dan ditulis oleh Taras Kuzio. Dalam jurnal tersebut Kuzio menganalisis tentang penyebab-penyebab konflik di Ukraina muncul setelah lebih dari 20 tahun perdamaian antar etnis dan wilayah. Kuzio menyatakan empat faktor yang membuat Ukraina berubah dari negara yang damai menjadi berkonflik dengan gerakan separatis Donbas dan Russia. Faktor-faktor tersebut ialah: pertama, bangkitnya autoritarianisme dan kekutan politik beraliran neo-Soviet *(Party of Regions, United Russia)*; kedua, reaksi terhadap gelombang protes yang didukung oleh barat *(Bulldozer, Rose and Orange Revolution, Euromaidan)*; ketiga, kuatnya penolakan terhadap ekspansi NATO dan Uni Eropa; dan terakhir, meningkatnya pengaruh nasionalisme dan revisionisme dalam kebijakan luar negeri Rusia.

Diakhir tulisan, Kuzio berkesimpulan bahwa penyebab munculnya konflik kekerasan di Ukraina ialah empat faktor yang telah disebutkan di atas. Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, dan *Party of Regions* memiliki perbedaan latar belakang sosial yang berbeda dengan kubu Ukraina Timur-sentris dan lebih memilih untuk menggunakan kekerasan dan mendukung kepentingan Rusia. Serta gerakan *Maidan* muncul 14 tahun setelah putin pertama kali mencapai kekuasaan di Rusia, dan muncul ketika ide nasionalime Rusia dan kultur politik Soviet mulai semakin berpengaruh, yang membuat pandangan negatif terhadap identitas nasional Ukraina (Taras, 2015).

Seperti dua literature sebelumnya, jurnal tulisan Kuzio menjadi bahan tinjauan peneliti dalam melaksanakan penelitian karena adanya persamaan tema yaitu konflik di Ukraina yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri Rusia.. Kesamaan lainnya ialah mencoba untuk menganalisis kepentingan serta latar belakang dari kebijakan luar negeri Rusia selama krisis yang terjadi di Ukraina. Namun perbedaan yang muncul dari penelitian ini dengan jurnal tulisan Kuzio ialah penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui korelasi serta pengaruh dari kebijakan luar negeri Rusia terhadap stabilitas keamanan di Ukraina pasca usaha strategis Rusia dalam pengimplementasian doktrin *Russian World*, sementara Kuzio lebih memfokuskan pada semakin berpengaruhnya ide nasionalisme dan neo-Soviet dalam situasi geopolitik dalam negeri Rusia dan Ukraina.

## 2.2 Kerangka Teoritis

Pada kerangka teoritis ini, penulis akan mengemukakan batasan ilmiah kutipan teori-teori dan konsep-konsep dari para ahli yang berhubungan dengan objek yang diteliti, agar dapat dijadikan sebagai landasan utuk menganalisa permasalahan dengan menyimpulkan hipotesis untuk memahami fenomena Hubungan Internasional, yang sesuai dengan judul penelitian

### 2.2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional, secara umum merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi antara negara dengan negara, negara dengan organisasi internasional ataupun individu, yang melintasi batas-batas wilayah negara. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai apa yang dimaksud dengan hubungan internasional. Karen Mingst menyatakan bahwa Hubungan Internasional adalah studi yang mempelajari tentang interaksi diantara berbagai macam aktor yang berpartisipasi dalam politik internasioal, yang mencakup negara, organisasi internasional, orgnisasi non pemerintah, kesatuan sub nasional seperti birokrasi dan pemerintahan lokal, dan para individu (Mingst dalam Ambarwati & Wijatmadja, 2016: 4-5). Conway W. Henderson mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi mengenai siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana dalam hal di luar negaranya atau dalam melintasi garis-garis batas nasional (Henderson dalam Ambarwati & Wijatmadja, 2016: 6).. Sementar Jackson dan Sorensen mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai sebuah studi yang mempelajari hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktifitas dan kebijakan pemerintah nasional, organisasi internasional, non-organisasi internasional, dan perusahaan multinasional” (Jackson & Sorensen, 2013: 4).

### 2.2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok dalam hubungan internasional. Politik internasional memiliki perbedaan dengan hubungan internasional dalam ruang lingkupnya. Hubungan internasional meliputi seluruh bentuk interaksi antar negara, termasuk organisasi non-negara. Sedangkan politik internasional terbatas hanya pada hal-hal yang berfokus pada kekuasaan yang melibatkan negara-negara berdaulat. Dalam mendefinisikan politik internasional, Morgentahu menuliskan:

*Domestic and international politics are but two different manifestations of the same phenomenon: the struggle for power…the statement that A has or wants political power over B signifes always that A is able, or wants to be able, to control certain actions of B through influencing B’s mind. And that is why, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the imme- diate aim: anything one wants to accomplish in politics of any sort requires getting other people to do something they would not otherwise want to do*. (Morgenthau dalam Bull, 2015: 49)

 Tujuan negara dalam politik internasional ialah untuk mempengaruhi negara lain untuk bertindak seperti sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. Serta inti dari tindakan dan pikiran dalam politik internasional adalah bagian dari *struggle for* power. Menurut Holsti, politik internasional adalah studi terhadap pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain. Selain unsur *power*, kepentingan dan tindakan dalam politik internasional juga meberikan perhatian terhadap sistem internasional dan perilaku para pembuat keputusan dalam situasi politik (Holsti dalam Perwita & Yani, 2005: 40).

 Mearsheimer menuliskan lima elemen dasar dari politik internasional, yang menurutnya apabila digabungkan dapat menjelaskan kepada kesimpulan. Lima elemen tersebut dituliskan menjadi lima premis yaitu:

 **Premise 1:** *There is no world government.*

**Premise 2:** *All states are capable of using force against other states.*

**Premise 3:** *No state can ever be certain that another state will not use force against it.*

**Premise 4:** *All states seek to maintain their territorial integrity and domestic autonomy.*

**Premise 5:** *States are rational actors.*(Mearsheimer dalam Bull, 2015: 13)

Setelah menjabarkan 5 premis tersebut, Mearsheimer menambahkan bahwa tidak satupun dari kelima asumsi tersebut yang secara umum mengatur bahwa negara seharusnya bersikap agresif satu sama lain, meskipun terdapat kemungkinan beberapa negara memiliki niat untuk bermusuhan. Tetapi satu-satunya asumsi yang menjadi motif spesifik dari semua negara ialah untuk tetap hidup, yang sebenarnya agak tidak berbahaya. Namun, ketika digabungkan, kelima premis tersebut menciptakan dorongan yang kuat akan kekuatan yang besar untuk berpikir dan bertindak agresif satu sama lain (Bull: 14, 2015).

Berkaitan dengan tujuan negara dalam politik internasional, perlu adanya pendefinisian tentang apa yang dimaksud dengan *power*. Dalam menjelaskan hal tersebut, Holsti membaginya menjadi tiga elemen terpisah yaitu: *power* adalah tindakan dalam bentuk proses dan hubungan sebagi usaha untuk mempengaruhi faktor lain; serta termasuk di dalamnya ialah penggunaan kapabilitas agar usaha untuk mempengaruhi dapat berhasil; dan respon terhadap tindakan (Holsti, 2006: 182).

### 2.2.3 Politik Luar Negeri

Secara umum politik luar negeri ialah seperangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaaran untuk mempertahankan, mengamankan, atau memajukan kepentingan nasional di daam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005: 47). Menurut Plano dan Olton, Politik luar negeri atau kebijakan luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional (Plano & Olton, 1999: 5). Kepentingan nasional merupakan keseluruhan nilai yang hendak diperjuangkan atau dipertahankan di forum internasional. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kepentingan nasional merupakan kunci dalam politik luar negeri.

Modelski menjelaskan *foreign policy* sebagai sistem kegiatan. Dalam perspektif ini, politik luar negeri dipandang sebagai suatu sistem di mana keputusan kebijakan luar negeri dirumuskan dan direncanakan untuk dilaksanakan. Melihat dari perspektif ini, pengambil keputusan adalah elemen penting dalam proses perumusan kebijakan luar negeri. Karena sistem kegiatan itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan lingkungan internasional, dua elemen lain melekat dengan kebijakan luar negeri, yaitu kemampuan (*power*) negara untuk melaksanakan dan apa yang menjadi dasar perumusan kebijakan luar negeri. Selain itu, Modelski mencatat bahwa kebijakan tentu dirumuskan di bawah bimbingan prinsip-prinsip tertentu dan harus dibuat dengan tujuan yang ditentukan. Menurutnya, konsep dasar dalam kebijakan luar negeriadalah: pembuat kebijakan; sasaran; prinsip; kekuatan untuk mengimplementasikan; dan dalam konteks apa kebijakan luar negeri dirumuskan dan diimplementasikan (Modelski dalam Dugis, 2008: 2)

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan dari politik luar negeri, yaitu:

1. Nilai (*values*) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Perwita & Yani, 2005: 51-52).

Rosenau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri pada dasarnya terdiri dari; sekelompok orientasi; seperangkat komitmen dan rencana aksi; dan bentuk perilaku (Rosenau dalam Dugis, 2008: 2). Sekelompok orientasi mengacu pada sikap, persepsi, dan nilai-nilai, yang berasal dari pengalaman sejarah negara dan keadaan strategis yang menandai tempatnya dalam politik dunia. Hal tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi pejabat negara ketika mereka dihadapkan dengan kondisi eksternal yang mengharuskan mereka untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan. Dengan kata lain, hal tersebut adalah prinsip yang mendasari perilaku negara di arena politik internasional. Komitmen dan rencana aksi adalah terjemahan dari sekelompok orientasi. Hal ini menggabungkan strategi, keputusan nyata, dan kebijakan yang dapat diamati yang diambil ketika negara dihubungkan dengan lingkungan eksternalnya, dan terdiri dari tujuan dan sarana spesifik yang melaluinya mereka dapat dicapai. Perilaku mengacu pada fase empiris kebijakan luar negeri yang terdiri dari langkah-langkah atau kegiatan nyata, yang mengikuti terjemahan orientasi umum kebijakan luar negeri. Dilihat dari sudut ini, dengan kata lain, aplikasi kebijakan luar negeri menjadi perilaku eksternal negara (Dugis, 2008: 2).

### 2.2.4 Kepentingan Nasional

Setiap tindakan maupun sikap negara yang diimplementasikan sebagai politik luar negeri tidak pernah terlepas dari kepentingan nasional. Kepentingan nasional tersebut dapat selalu berorientasi kepada ideologi ataupun sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ideologis atau atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan atau gabungan antara kedua pertimbangan tersebut. Bisa juga kadang-kadang terjadi hubungan yang saling menyambut antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjadi suatu hubungan timbal balik dan terjadi saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terjadi formulasi yang lain atau baru (Soeprapto, 1997: 149-150).

Miroslav Nincic memperkenalkan tiga kriteria atau yang disebutnya asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam mendefinisikan kepentingan nasional. Pertama, kepentingan harus bersifat vital sehingga pencapaiannya harus menjadi prioritas utama pemerintah dan masyarakat. Kedua, kepentingan tersebut harus berkaitan dengan lingkungan internasional Artinya pencapaian kepentingan nasional harus dipengaruhi oleh lingkungan internasional. Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik dari individu, kelompok atau lembaga pemerintahan. Sehingga menjadi kepedulian masyarakat secara keseluruhan (Jemadu, 2008: 67).

Menurut Paul Seabury kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita tujuan suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, gejala tersebut merupakan suatu normatif, atau konsep umum kepentingan nasional. Arti kedua yang sama pentingnya biasa bersifat deskriptif. Dalam pengertian deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Kepentingan nasional dalam pengertian deskriptif, berarti memindahkan metafisika ke dalam fakta (kenyataan) dengan kata lain kepentingan nasional serupa dengan para perumus politik luar negeri (Seabury dalam Holsti, 1987: 168-169).

### 2.2.5 Teori Stabilitas

Stabilitas digambarkan sebagai salah satu hal penting dalam usaha negara untuk bertahan hidup di dalam sistem internasional. Dari sudut pandang yang lebih luas, dan sistematik, Karl Deutsch dan David Singer berpendapat bahwa:

From the broader, or systemic, point of view, we shall define stability as the probability that the system retains all of its essential characteristics; that no single nation becomes dominant; that most of its members continue to survive; and that large-scale war does not occur. And from the more limited perspective of the individual nations, stability would refer to the probability of their continued political independence and territorial integrity without any significant probability of becoming engaged in a "war for survival. (Singer, 2013: 390-391)

Selain itu dalam menganalisis stabilitas dalam sistem internasional yang salaing mempengaruhi dalam sistem internasional, Deutchs dan Singer memberikan dua cara dalam menganalisis hal tersebut. *Pertama,* dengan menghubungkan variable independen (jumlah aktor independen) dengan variable dependen (stabilitas sistem) melalui penekanan pada peluang interaksi. *Kedua,* pada bagin konsep interaksi diperluas ke titik dimana ia berdampak pada tingkat perhatian bahwa setiap negara dalam sistem dapat mengalokasikan ke semua negara lain atau kemungkinan koalisi negara.

 Ketika terjadinya ketidakstabilan makan dapat terwujud kepada fenomena kemungkinan perang. Menurut Powell, Probabilitas perang dalam model merupakan fungsi dari perbedaan antara distribusi manfaat status quo dan distribusi yang diharapkan dihasilkan dari penggunaan kekuatan (Powell, 2007: 240). Penekanan konsep yang dijalaskan oleh Powell, ia lebih menekankan tenang adanya keterkaitan yang erat antara usaha dalam pelestarian *status quo* dengan distribusi kekuatan. Kemungkinan perang adalah fungsi dari perbedaan antara *status quo* dan distribusi kekuasaan. Dalam menjelaskan model tersebut, ia menulis:

*It might seem at first that the prepon- derance-of-power school is clearly correct and that the bargaining is less likely to break down if one of the states has a preponderance of power. That is, suppose a state, say S¹, has just proposed a particular division to the other state S². S² would be tempted to use force to imposea settlement rather than accept S¹’s offer only if the expected payoff tousing force were at least as large as the payoff to agreeing to the proposal. But the weaker S², the lower its expected payoff to fighting. Indeed, if S² is sufficiently weak, its payoff to using force will be less than its payoff to agreeing to S¹’s offer. In this case, S² will acquiesce to S¹’s demand and will not be tempted to use force. Nor will S¹ be tempted to use force, since S² is willing to agree to S¹’s demand. This reasoning, which suggests that a preponderance of power will be more stable, is es- sentially the reasoning Organski advances: “A preponderance of power . . . increases the chances of peace, for the greatly stronger side need not fight at all to get what it wants, while the weaker side would be plainly foolish to attempt battle for what it wants*. (Powell, 2007: 242-243)

### 2.2.6 Konsep Keamanan

Konsep keamanan sampai saat ini masih menjadi konsep yang masih menjadi bahan perdebatan di kalangan sarjana hubungan internasional. Perdebatan ini muncul terutama karena perbedaan fokus keamanan tersebut baik individu, nasional, ataupun internasional. Menurut Arnold Wolfers, keamanan mengarah kepada tingkatan perlindungan terhadap nilai-nilai (*values*) yang telah dimiliki sebelumnya (Wolfers, 1952: 484). Pemahaman tentang *values* yang dimaksud di sini memang ambigu dan menimbulkan perdebatan pula dalam penafsirannya. Tetapi lebih lanjut Wolfer berpendapat bahwa sebaiknya negara tidak bertindak secara seragam antara satu dengan yang lain, karena mereka tidak menghadapi ancaman yang sama karean pada hakikaktnya semua negara adalah musuh (terlepas dari ia ada adalah sekutu atau bukan) maka dari itu semua negara sama-sama dalam bahaya serangan (Wolfers, 1952: 484-485). Namun, David A. Baldwin menjelaskan tidak hanya pemaknaan *values* disini tetapi juga konsep keamanan itu sendiri. Baldwin berpendapat bahwa keamanan ialah upaya yang dilakukan untuk menjaga nilai-nilai yang dimiliki oleh individu, negara, dan sistem internasional seperti keamanan fisik, kesejahteraan ekonomi, otonomi, kesehatan psikologis, dan lain-lain dari ancaman yang berupaya untuk mengambil atau menghilangkan nilai-nilai tersebut (Baldwin, 1997: 13-17).

Sebuah film dokumenter berjudul *The Putin Interviews*, mendokumentasikan serangkaian wawancara dengan orang paling berkuasa di Rusia yaitu, Vladimir Vladimirovich Putin, Presiden Federasi Rusia. Dalam salah satu segmen wawancara, putin berpendapat

Saya sering mendapatkan kritik yang menuduh bahwa saya menyesali disintegrasi Uni Soviet. Tapi, hal yang paling penting setelah disintegrasi Uni Soviet, 25 juta rakyat Rusia mendapati diri mereke berada di luar negeri dalam semalam…orang-orang tadinya hidup dalam satu negara…mereka punya keluarga, pekerjaan, tempat tinggal…dan dalam sekejap mereka mendapati diri mereka berada di luar negeri…dan hal ini adalah salah satu malapetaka (geopolitik) terbesar di abad ke-20. (O. Stone, 2017)

Pendapat tersebut seperti menggambarkan bahwa Putin memiliki perhatian khusus terhadap warga Rusia terutama yang berada di negara-negara bekas Uni Soviet. Pendapat tersebut pun menggambarkan adanya indikasi bahwa Rusia berkepentingan untuk mengambil kembali wilayah-wilayah yang terdapat mayoritas etnis Rusia atau setidaknya menguatkan pengaruh di wilayah tersebut. Indikasi tersebut muncul dari adanya doktrin *Russian World* yaitu sebuah doktrin yang menekankan bahwa populasi berbahasa Rusia di luar negeri secara ideologis terkonstruksi dan secara politik terkoneksi dengan kepemimpinan Kremlin (Suslov, 2017)

 Di tahun pertama ia menjabat sebagai presiden, Putin menandatangi dokumen tentang konsep-konsep yang digunakan dalam perumusan kebijakan luar negeri yang pada intinya menganggap kebijakan keamanan Barat adalah ancaman bagi Rusia dan Rusia memproitaskan *counter-balancing* ancaman tersebut dengan penguatan kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan dengan anggota *Commonwealth of Independent State* (CIS) (Dyker, 2012: 8). CIS adalah persemakmuran 10 negara-negara pecahan Uni Soviet yang dibentuk melalui Belavezha Accords dan Alma-Ata Protocol yang salah anggotanya ialah Ukraina.

 CIS menjadi garda terdepan justifikasi Rusia dalam menahan perluasan pengaruh Barat ke negara-negara bekas Uni Soviet. Namun, keberpihakan Ukraina terhadap Barat yang ditandai dengan *Euromaidan* membuat Kremlin harus memberikan perhatian ekstra terhadap *counter-balancing* di Ukraina. Maka aneksasi Krimea menjadi salah satu langkah Putin untuk mempertahankan pengaruh Rusia serta aneksasi tersebut memiliki landasan strategis yaitu sebagai pangkalan militer utama di Sevastopol sebagai pintu masuk ke Laut Hitam dan Mediterania. Dukungan terhadap gerakan separatis di Donbass pun menjadi jalan bagi Rusia untuk menahan perluasan Uni Eropa ke Ukraina. Gerakan separatis yang mendeklarasikan berdirinya negara DPR dan LPR ini adalah strategi Rusia untuk membentuk sebuah konfederasi yang disebut *novorossiya* yan beranggotakan dua negara tersebut yang nantinya akan menjadi satelit bagi Rusia di Ukraina.

## 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdeasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut: **“Kebijakan luar negeri Rusia di Ukrainasebagai usaha untuk meluaskan kembali *sphere of influence* terhadap negara-negara *near abroad* yang berkurang pasca bubarnya Uni Soviet dan untuk menahan perluasan pengaruh negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat ke Eropa Timur, menyebabkan instabilitas keamanan dalam negeri Ukraina yang ditandai dengan aneksasi Krimea oleh Rusia dan gerakan separatis di Donbas**

## 2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** **( Teorik)** | **Indikator** **( Empirik)** | **Verifikasi** **(Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** Kebijakan luar negeri Rusia di Ukrainasebagai usaha untuk meluaskan kembali *sphere of influence* terhadap negara-negara *near abroad* yang berkurang pasca bubarnya Uni Soviet dan untuk menahan perluasan pengaruh negara-negara barat seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat ke Eropa Timur | 1. Dukungan terhadap mantan presiden Ukraina Viktor Yanukovych
2. Aneksasi Krimea
3. Memberikan bantuan kepada gerakan separatis di Donbass
4. Usaha untuk meluaskan pengaruh terhadap negara near abroad.
5. Menahan perluasan Uni Eropa dan Amerika Serikat ke Eropa Timur
 | * (Maio, 2016)
* (Valdai Discussion Club, 2014)
* John Mearsheimer, *Why Ukraine Crisis is the West’s Fault*; <https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault>
 |
| **Variabel Terikat:**Menyebabkan instabilitas keamanan dalam negeri Ukraina yang ditandai dengan aneksasi Krimea oleh Rusia dan gerakan separatis di Donbass | 1. Kemunculan gerakan *Euromaidan* di kota-kota besar Ukraina khususnya di basis pendukung Uni Eropa
2. Penggulingan presiden Viktor Yanukovych
3. Aneksasi Krimea secara sepihak yang dilakukan oleh Federasi Rusia
4. Konflik bersenjata antara pemerintah Ukraina dengan gerakan separatis di Donbass yang didukung oleh Rusia
 | * (Onuch, 2014)
* (Katchanovski, 2016)
* (Saluschev, 2014)
 |

## 2.5 Skema dan Alur Penelitian

PERLUASAN BARAT KE EROPA TIMUR

DOKTRIN RUSSIAN WORLD DAN NEAR ABROAD

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA TERHADAP UKRAINA

 --------------------

 Aneksasi Krimea Munculnya gerakan separatis

 Terganggunya stabilitas keamanan Ukraina